

**STRATEGI KOMUNIKASI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH MENUJU KEANGGOTAAN OECD (ORGANIZATION FOR
ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT)**

Sultan Alif Rinaldi¹, Vivien Febri Astuti²

^{1,2}Komunikasi Digital dan Media Sekolah Vokasi IPB University

¹alifrinaldi@apps.ipb.ac.id, ²vivien-fas@apps.ipb.ac.id

ABSTRACT

Indonesia's accession process toward membership in the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) requires an integrated government communication strategy to strengthen national coordination, convey policy narratives, and enhance Indonesia's image at the international level. In this context, the Ministry of Primary and Secondary Education (Kemendikdasmen) plays an important role in representing Indonesia's commitment to educational reform and global governance. This study aims to analyze the formulation and implementation of Kemendikdasmen's communication strategy in the cooperation process toward OECD membership. This study employed a qualitative descriptive approach using interviews, observation, and documentation as data collection techniques. Data validity was tested through source triangulation and technique triangulation. The findings show that the formulation of communication strategies was conducted through national coordination led by the Coordinating Ministry for Economic Affairs through the OECD National Secretariat. Communication strategies were formulated by constructing institutional narratives emphasizing Indonesia's commitment to educational reform, data-based governance, and readiness toward global education standards. The implementation of communication strategies was carried out through inter-ministerial coordination, OECD hearings, technical reviews, policy presentations, and diplomatic communication during the accession process. This study shows that communication strategies play an important role in supporting national coordination and building Indonesia's image as a country committed to educational reform and global governance

Keywords: Communication Strategy, Government Communication, International Cooperation, OECD

ABSTRAK

Proses akses Indonesia menuju keanggotaan *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) menuntut adanya strategi komunikasi pemerintah yang terintegrasi guna membangun koordinasi nasional, menyampaikan narasi kebijakan, serta memperkuat citra Indonesia di tingkat internasional. Dalam konteks tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memiliki peran penting dalam merepresentasikan komitmen Indonesia terhadap reformasi pendidikan dan tata kelola global. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis formulasi dan implementasi strategi komunikasi Kemendikdasmen dalam proses kerja sama menuju OECD. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data diuji

menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi strategi komunikasi dilakukan melalui koordinasi nasional yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Sekretariat Nasional OECD. Strategi komunikasi dirumuskan melalui penyusunan narasi institusional yang menekankan komitmen Indonesia terhadap reformasi pendidikan, penguatan tata kelola berbasis data, serta kesiapan menuju standar pendidikan global. Implementasi strategi komunikasi dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian, audiensi OECD, *technical review*, presentasi kebijakan, dan komunikasi diplomatik selama proses akses berlangsung. Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi memiliki peran penting dalam mendukung koordinasi nasional dan membangun citra Indonesia sebagai negara yang berkomitmen terhadap reformasi pendidikan dan tata kelola global.

Kata Kunci: Kerja Sama Internasional, Komunikasi Pemerintah, Strategi Komunikasi, OECD

A. Pendahuluan

Perkembangan globalisasi dan transformasi digital telah mengubah komunikasi antarnegara menjadi lebih strategis, terintegrasi, dan berbasis citra institusional. Dalam konteks ini, komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian pesan, tetapi juga instrumen untuk membangun legitimasi, reputasi, dan posisi tawar negara di forum internasional. Oleh karena itu, keterlibatan pemerintah dalam forum global memerlukan strategi komunikasi yang sistematis agar pesan kebijakan tersampaikan secara jelas dan selaras dengan kepentingan nasional.

Indonesia resmi memulai proses akses menuju keanggotaan *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) pada tahun 2024 setelah

menerima roadmap akses pada *Ministerial Council Meeting* di Paris. Proses ini menjadikan Indonesia sebagai negara Asia Tenggara pertama yang memasuki tahapan akses formal OECD. Dalam proses tersebut, sektor pendidikan menjadi bidang strategis karena berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia, tata kelola pendidikan, dan kesiapan menghadapi standar pendidikan global berbasis evaluasi internasional.

Forum OECD menjadi ruang diskusi teknokratis dan juga arena komunikasi kebijakan yang melibatkan pertukaran narasi, argumentasi, dan representasi identitas nasional. Dalam hal ini, pemerintah dituntut tidak hanya menyampaikan data dan capaian kebijakan, tetapi juga membangun

citra institusional yang menunjukkan komitmen terhadap reformasi dan tata kelola global (Nugroho, 2021). Peran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia (Kemendikdasmen) menjadi semakin penting, terutama ketika OECD menghadiri kegiatan audiensi Indonesia Jakarta 2026 pada bulan Februari 2026. Posisi tersebut menempatkan Kemendikdasmen sebagai aktor komunikasi strategis yang merepresentasikan arah kebijakan pendidikan nasional kepada mitra internasional melalui perumusan pesan, pengelolaan media, koordinasi lintas kementerian, hingga strategi komunikasi digital.

Strategi komunikasi yang tidak terstruktur berpotensi menimbulkan inkonsistensi pesan dan lemahnya positioning Indonesia dalam percaturan kebijakan global. Sebaliknya, strategi komunikasi yang terintegrasi dapat memperkuat citra institusi, meningkatkan diplomasi pendidikan, dan membangun kepercayaan mitra internasional. Dalam era digital, strategi komunikasi pemerintah juga mencakup komunikasi internal, eksternal, dan digital berbasis reputasi institusional. Hasan et al. (2025) menegaskan

bahwa komunikasi strategis berperan penting dalam memperkuat diplomasi dan kerja sama internasional melalui media digital dan penyusunan pesan yang sesuai dengan konteks global. Selain itu, Sariwaty (2018) menjelaskan bahwa komunikasi internasional menjadi elemen penting dalam membangun hubungan kerja sama global melalui strategi penyampaian pesan dan representasi institusi.

Kajian mengenai irisan antara kebijakan pendidikan, diplomasi internasional, dan strategi komunikasi pemerintah masih terbatas. Widityana (2025) membahas pengaruh hasil PISA terhadap kebijakan pendidikan Indonesia, namun belum mengkaji strategi komunikasi kementerian dalam merespons asesmen global tersebut. Rinaldi et al. (2025) dalam penelitian "*Educational Diplomacy in Practice: Embassy - School Collaboration in Riyadh*" meneliti diplomasi pendidikan melalui kolaborasi kedutaan dan sekolah, tetapi belum membahas strategi komunikasi kementerian pendidikan dalam forum multilateral seperti OECD. Sementara itu, Aulia et al. (2023) meneliti "Strategi Komunikasi Publik Kementerian

Perindustrian tentang Isu Industri pada Presidensi G20 Indonesia”. namun fokusnya berada pada sektor industri dan ekonomi makro.

Berdasarkan tinjauan tersebut, terdapat kesenjangan penelitian mengenai strategi komunikasi Kemendikdasmen dalam proses menuju akses OECD. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menggabungkan perspektif hubungan internasional, diplomasi pendidikan, dan komunikasi strategis pemerintah dalam konteks transisi kelembagaan Kemendikdasmen. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan literatur mengenai tata kelola komunikasi pendidikan Indonesia di tingkat global sekaligus menjadi referensi akademik dan praktis dalam penguatan diplomasi pendidikan berbasis komunikasi strategis.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses formulasi dan implementasi strategi komunikasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan

Menengah (Kemendikdasmen) dalam proses akses Indonesia menuju keanggotaan OECD. Penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman fenomena sosial secara mendalam melalui perspektif subjek penelitian serta kondisi yang terjadi secara alamiah (Sugiyono, 2023). Pendekatan deskriptif digunakan karena penelitian ini berusaha menggambarkan secara sistematis bagaimana strategi komunikasi dirancang, dijalankan, dan dimaknai dalam konteks komunikasi internasional dan diplomasi pendidikan.

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme. Paradigma konstruktivisme memandang realitas sosial sebagai hasil konstruksi yang dibentuk melalui interaksi sosial dan komunikasi (Creswell, 2018). Dalam penelitian ini, strategi komunikasi Kemendikdasmen dipahami sebagai bentuk konstruksi institusi dalam membangun citra dan narasi Indonesia di hadapan OECD. Paradigma ini relevan karena penelitian tidak hanya melihat komunikasi sebagai penyampaian pesan, tetapi juga bagaimana pesan tersebut dibentuk, dibingkai, dan dimaknai dalam proses akses OECD.

Subjek penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses kerja sama internasional menuju OECD di lingkungan Kemendikdasmen. Informan penelitian terdiri dari Kepala Tim Multilateral pada Divisi Kerja Sama Internasional Kemendikdasmen dan satu Analis Kerja Sama Internaional. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai kebutuhan penelitian (Sugiyono, 2023). Teknik ini dipilih karena kedua informan dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam proses strategi komunikasi Kemendikdasmen menuju OECD.

Objek dalam penelitian ini adalah strategi komunikasi Kemendikdasmen dalam proses akses Indonesia menuju keanggotaan OECD. Fokus penelitian mencakup formulasi strategi komunikasi dan implementasi strategi komunikasi dalam forum internasional, media komunikasi, penyusunan narasi, serta bentuk komunikasi diplomatik yang dilakukan Kemendikdasmen kepada OECD.

Wawancara semi terstruktur digunakan agar peneliti memiliki pedoman wawancara, namun tetap fleksibel dalam menggali informasi secara lebih mendalam sesuai kondisi di lapangan (Moleong, 2018). Melalui wawancara ini, peneliti menggali informasi mengenai proses perencanaan strategi komunikasi, penyusunan pesan dan narasi komunikasi, pemilihan media dan forum komunikasi, hingga implementasi komunikasi dalam audiensi OECD.

Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi partisipatif dengan mengikuti langsung kegiatan audiensi OECD selama tiga hari yang dilakukan pada 24 – 26 Februari 2026 yang berlokasi di 101 Hotel Darmawangsa, Jakarta Selatan. Observasi dilakukan untuk memperoleh pemahaman langsung mengenai implementasi strategi komunikasi Kemendikdasmen dalam forum internasional. Observasi dalam penelitian kualitatif digunakan untuk memahami perilaku, interaksi, dan situasi sosial secara langsung di lapangan (Nasution, 2017). Dalam kegiatan observasi ini, peneliti mengamati pola komunikasi delegasi Kemendikdasmen, proses

penyampaian pesan kepada OECD, penggunaan media komunikasi, dinamika forum audiensi, serta respons yang muncul selama kegiatan berlangsung.

Teknik dokumentasi juga digunakan sebagai data pendukung penelitian. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan proses akses OECD, seperti paparan audiensi, laporan kegiatan, dokumen kerja sama internasional, publikasi resmi Kemendikdasmen, foto kegiatan, dan dokumen pendukung lainnya. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat hasil wawancara dan observasi sehingga data penelitian menjadi lebih valid dan kredibel (Arikunto, 2019). Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Saldana, 2014). Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan fokus penelitian. Setelah itu, data disajikan dalam bentuk narasi deskriptif agar memudahkan peneliti memahami pola dan hubungan antar data. Tahap terakhir dilakukan dengan penarikan

kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang dikaitkan dengan *Strategic Communication Theory*, Model Komunikasi Harold Lasswell, dan *Framing Theory*.

Keabsahan data pada penelitian ini diuji menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi agar diperoleh data yang valid dan konsisten (Sugiyono, 2023). Selain triangulasi teknik, penelitian ini juga menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari kedua narasumber penelitian. Penelitian ini dilakukan di lingkungan Divisi Kerja Sama Internasional Kemendikdasmen serta dalam kegiatan audiensi OECD yang diikuti langsung oleh peneliti selama tiga hari. Waktu penelitian dilaksanakan selama proses pengumpulan data yang mencakup wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait proses akses Indonesia menuju keanggotaan OECD.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Formulasi Strategi Komunikasi

Berdasarkan hasil penelitian, formulasi strategi komunikasi Kemendikdasmen dalam proses

aksesi Indonesia menuju OECD dilakukan melalui mekanisme koordinasi nasional yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Sekretariat Nasional OECD. Proses akses OECD diposisikan sebagai agenda strategis nasional yang melibatkan berbagai kementerian sesuai bidang masing-masing. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh informan bahwa,

“Proses OECD ini sebenarnya bukan hanya urusan satu kementerian. Semua dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Perekonomian melalui Sekretariat Nasional OECD” (Informan 1, wawancara, 8 Mei 2026).

Dalam konteks tersebut, Kemendikdasmen berperan sebagai pelaksana sektoral di bidang pendidikan dengan menyesuaikan komunikasi berdasarkan kerangka koordinasi nasional yang telah ditetapkan pemerintah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi Kemendikdasmen tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi kebijakan pendidikan, tetapi juga sebagai instrumen koordinasi

kebijakan, pembentukan narasi institusional, dan pembangunan citra Indonesia di forum internasional. Narasi komunikasi yang dibangun menekankan komitmen Indonesia terhadap reformasi pendidikan, penguatan tata kelola berbasis data, serta kesiapan menuju standar pendidikan global. Informan menjelaskan bahwa,

“yang ingin ditunjukkan itu bahwa Indonesia serius melakukan perbaikan pendidikan dan ingin belajar juga dari praktik-praktik baik yang diterapkan OECD” (Informan 2, wawancara, 8 Mei 2026).

OECD dipandang sebagai simbol negara maju sehingga Indonesia ingin menunjukkan kesiapan menuju standar global. Hal tersebut diperkuat melalui pernyataan informan bahwa,

“OECD itu kan identik dengan negara maju, jadi Indonesia ingin menunjukkan bahwa kita bergerak ke arah sana” (Informan 1, wawancara, 8 Mei 2026).

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa formulasi strategi komunikasi dipengaruhi oleh

Initial Memorandum (IM) sebagai dokumen legal utama dalam proses akses OECD. Karena IM bersifat legal dan mengikat, ruang perubahan substansi kebijakan menjadi relatif terbatas sehingga strategi komunikasi lebih diarahkan pada sinkronisasi kebijakan, penguatan koordinasi internal, dan penyelarasan implementasi program antarkementerian. Informan menyampaikan bahwa,

“Karena *Initial Memorandum* itu sudah legal dan mengikat, jadi sebenarnya perubahan besar itu tidak banyak. Penyesuaian lebih ke koordinasi internal dan sinkronisasi program” (Informan 2, wawancara, 8 Mei 2026).

Struktur koordinasi berlapis antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kemendikdasmen, dan Kemendikti dibangun untuk menjaga konsistensi pesan serta meminimalkan perbedaan informasi dalam komunikasi dengan OECD.

Temuan tersebut sejalan dengan *Strategic Communication Theory* yang menjelaskan bahwa komunikasi digunakan secara

terencana untuk mencapai tujuan strategis organisasi melalui pengelolaan pesan, koordinasi aktor, dan penyelarasan komunikasi. Dalam penelitian ini, komunikasi digunakan sebagai alat untuk menyatukan persepsi antar kementerian sekaligus memastikan bahwa narasi reformasi pendidikan Indonesia tetap konsisten di hadapan OECD.

Dalam perspektif Model Komunikasi Harold Lasswell, unsur *Who* terlihat pada Kemendikdasmen sebagai komunikator sektoral, *Says What* berupa pesan mengenai reformasi pendidikan dan kesiapan menuju standar global, serta *To Whom* yang ditujukan kepada OECD sebagai organisasi internasional. Selain itu, berdasarkan *Framing Theory*, Kemendikdasmen membingkai Indonesia sebagai negara yang sedang bergerak menuju standar pendidikan negara maju melalui reformasi kebijakan, modernisasi pendidikan, dan keterbukaan terhadap evaluasi internasional.

Dengan demikian, strategi komunikasi Kemendikdasmen menunjukkan bahwa komunikasi digunakan sebagai instrumen strategis untuk membangun

koordinasi nasional, menjaga konsistensi pesan, memperkuat legitimasi internasional, dan membentuk citra Indonesia sebagai negara yang berkomitmen terhadap reformasi pendidikan dan tata kelola global.

Implementasi Strategi Komunikasi

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi strategi komunikasi Kemendikdasmen menuju OECD dilakukan melalui audiensi OECD secara daring dan luring, technical review, forum diskusi, presentasi kebijakan, serta komunikasi diplomatik selama proses aksesori berlangsung. Implementasi komunikasi dilakukan dalam kerangka koordinasi nasional yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Sekretariat Nasional OECD. Dalam pelaksanaannya, Kemendikdasmen bertanggung jawab menyampaikan data, kebijakan, dan perkembangan sektor pendidikan kepada OECD sekaligus melakukan koordinasi internal dengan Kemendikti dan unit-unit terkait di bidang pendidikan. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga sinkronisasi kebijakan dan konsistensi

pesan antarlembaga. Informan menyampaikan bahwa,

“Karena banyak bidang yang terlibat, komunikasi itu harus terus disinkronkan supaya arah pesannya tetap sama” (Informan 1, wawancara, 8 Mei 2026).

Hasil observasi selama audiensi OECD pada 24–26 Februari 2026 menunjukkan bahwa implementasi komunikasi tidak hanya berupa penyampaian data teknis pendidikan, tetapi juga membangun narasi mengenai komitmen Indonesia terhadap reformasi pendidikan dan penguatan tata kelola pendidikan berbasis data. Audiensi tersebut dihadiri oleh OECD officer serta berbagai pimpinan unit di bawah Kemendikdasmen dan Kemendikti dengan pembahasan mengenai reformasi sistem pendidikan nasional, asesmen berbasis data seperti PISA dan PIAAC, penguatan kualitas guru, pendidikan vokasi, transformasi digital pendidikan, hingga pemanfaatan artificial intelligence (AI) dalam pendidikan. Dalam forum tersebut, delegasi Indonesia menyampaikan berbagai program prioritas pendidikan melalui presentasi, diskusi teknis, dan

komunikasi diplomatik dengan pihak OECD. Informan menjelaskan bahwa,

“Bukan hanya menyampaikan data, tapi juga bagaimana Indonesia menunjukkan keseriusan dalam reformasi pendidikan” (Informan 2, wawancara, 8 Mei 2026).

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi strategi komunikasi terus mengalami penyesuaian sesuai perkembangan proses aksesi OECD karena setiap bidang memiliki tahapan review yang berbeda. Pada sektor pendidikan, implementasi komunikasi lebih banyak diarahkan pada sinkronisasi internal, penguatan koordinasi lintas unit, dan penyelarasan kebijakan dengan *Initial Memorandum* yang telah disampaikan kepada OECD. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh informan bahwa,

“Bidang pendidikan sendiri sebenarnya baru mulai technical review di Februari, jadi penyesuaiannya masih banyak di internal” (Informan 1, wawancara, 8 Mei 2026).

Selain itu, implementasi strategi komunikasi juga diarahkan

pada pembentukan sistem komunikasi satu pintu guna menjaga konsistensi pesan dan menghindari perbedaan informasi antarlembaga.

Temuan tersebut sejalan dengan *Strategic Communication Theory* yang menjelaskan bahwa komunikasi digunakan sebagai alat pencapaian tujuan strategis melalui pengelolaan pesan, hubungan antar pemangku kepentingan, dan pemanfaatan berbagai saluran komunikasi. Dalam perspektif Model Komunikasi Harold Lasswell, unsur *In Which Channel* terlihat melalui penggunaan audiensi OECD, *technical review*, forum diskusi, dokumen resmi, dan komunikasi diplomatik sebagai saluran komunikasi utama, sedangkan unsur *With What Effect* terlihat dari upaya membangun citra Indonesia sebagai negara yang berkomitmen terhadap reformasi pendidikan dan kesiapan menuju standar global. Selain itu, berdasarkan *Framing Theory*, implementasi komunikasi dilakukan dengan membingkai Indonesia sebagai negara yang terbuka terhadap evaluasi internasional, aktif melakukan pembelajaran kebijakan, dan serius melakukan transformasi pendidikan nasional. Dengan

demikian, implementasi strategi komunikasi Kemendikdasmen menunjukkan bahwa komunikasi tidak hanya digunakan sebagai alat penyampaian informasi, tetapi juga sebagai instrumen koordinasi lintas lembaga, diplomasi pendidikan, pembangunan citra negara, dan penguatan legitimasi internasional Indonesia dalam proses akses menuju keanggotaan OECD.

Keabsahan Data

Berdasarkan hasil penelitian, keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari beberapa informan yang terlibat dalam proses kerja sama Kemendikdasmen menuju OECD, khususnya pada Divisi Kerja Sama Internasional. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi selama proses penelitian berlangsung.

Hasil wawancara dengan informan mengenai formulasi dan implementasi strategi komunikasi kemudian dibandingkan dengan hasil

observasi pada kegiatan audiensi OECD dan technical review, serta diperkuat melalui dokumen resmi seperti notula rapat, Initial Memorandum, dan dokumen kerja sama OECD lainnya. Melalui proses triangulasi tersebut, ditemukan adanya kesesuaian informasi terkait koordinasi lintas kementerian, penyusunan narasi komunikasi, serta implementasi komunikasi diplomatik dalam proses akses Indonesia menuju OECD. Penggunaan triangulasi dalam penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas, konsistensi, dan validitas data sehingga temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, formulasi strategi komunikasi Kemendikdasmen dalam proses kerja sama menuju keanggotaan OECD dilakukan melalui mekanisme komunikasi strategis yang terintegrasi dalam koordinasi nasional di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Sekretariat Nasional OECD. Formulasi strategi komunikasi dilakukan melalui penyusunan tujuan komunikasi,

pengelolaan pesan dan narasi institusional, serta sinkronisasi kebijakan antar kementerian dan lembaga. Narasi komunikasi yang dibangun menekankan komitmen Indonesia terhadap reformasi pendidikan, penguatan tata kelola berbasis data, dan kesiapan menuju standar pendidikan global. Selain itu, komunikasi juga digunakan sebagai instrumen *framing* untuk membangun citra Indonesia sebagai negara yang terbuka terhadap evaluasi internasional dan serius melakukan transformasi pendidikan nasional.

Implementasi strategi komunikasi Kemendikdasmen dilakukan melalui komunikasi lintas kementerian, audiensi OECD, *technical review*, forum diskusi, presentasi kebijakan, serta komunikasi diplomatik selama proses aksesasi berlangsung. Implementasi komunikasi tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi administratif, tetapi juga sebagai instrumen koordinasi, sinkronisasi kebijakan, dan pembangunan legitimasi internasional Indonesia dalam proses aksesasi OECD. Dalam pelaksanaannya, strategi komunikasi terus mengalami penyesuaian sesuai perkembangan proses *review* pada

masing-masing bidang. Selain itu, implementasi komunikasi juga diarahkan pada pembentukan sistem komunikasi satu pintu untuk menjaga konsistensi pesan dan menghindari perbedaan informasi antar lembaga. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi Kemendikdasmen dalam kerja sama menuju OECD berperan penting dalam mendukung koordinasi nasional, diplomasi pendidikan, serta pembentukan citra Indonesia dalam forum internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, R., Prasetyo, D., & Ramadhan, F. (2023). Strategi komunikasi publik Kementerian Perindustrian tentang isu industri pada Presidensi G20 Indonesia. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 12(2), 115–128.
<https://doi.org/10.25008/jpi.v5i1.121>
- Cangara, H. (2017). *Perencanaan dan strategi komunikasi* (Edisi revisi). Jakarta: Rajawali Pers.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

- Effendy, O. U. (2018). *Ilmu komunikasi: Teori dan praktik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>
- Hasan, M., Putri, A., & Nugraha, R. (2025). Strategi komunikasi internasional pemerintah Indonesia pada era transformasi digital. *Jurnal Hubungan Internasional*, 9(1), 44–59.
- Kriyantono, R. (2020). *Teknik praktis riset komunikasi kuantitatif dan kualitatif* (2nd ed.). Jakarta: Kencana.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, A. (2021). Komunikasi pemerintah dalam forum internasional dan pembentukan citra negara. *Jurnal Diplomasi dan Komunikasi Global*, 7(2), 88–101. <https://repository.upnjatim.ac.id/42893>
- OECD. (2025). *OECD accession roadmap for Indonesia*. Paris: OECD Publishing.
- Prasetyo, A. (2020). Framing komunikasi pemerintah dalam kerja sama internasional. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 15(1), 67–79.
- Rachmawati, D. (2022). Komunikasi strategis pemerintah dalam koordinasi lintas sektor kebijakan nasional. *Jurnal Komunikasi Pemerintahan*, 10(2), 101–115.
- Rinaldi, S. A., Astuti, V. F., & Putra, M. R. (2025). Educational diplomacy in practice: Embassy-school collaboration in Riyadh. *Journal of International Education and Diplomacy*, 4(1), 21–35. <https://doi.org/10.56916/jirpe.v4i4.2074>
- Sari, P. (2021). Implementasi komunikasi pemerintah dalam penyampaian kebijakan internasional. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(2), 55–70.
- Sariwaty, Y. (2018). Komunikasi internasional dalam kerja sama antarnegara. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(1), 55–67.
- Widitiana, N. (2025). Dampak hasil PISA terhadap kebijakan pendidikan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 14(1), 1–14.
- Wijaya, R. (2022). Diplomasi komunikasi pemerintah dalam forum internasional. *Jurnal Hubungan Internasional Indonesia*, 6(2), 73–89.
- Yunitasari., & Imaniar, I. (2026, Mei 8). Wawancara pribadi terkait strategi komunikasi Kemendikdasmen menuju OECD.